



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700 /Kep. 534 - Inspektoral /2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan pendayagunaan pengawasan fungsional secara berkala serta untuk kelancaran tugas bagi aparat pengawas internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/lembaga Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2024



PERSTAWAN BUDODAN KEBEDA PEROWASAN TAWUNAN INSPENTORAT JABARAH TUNDAI ARUGAMPAI JUBA

| No                   | Area Pengawasan                   | Arahan Pengawasan | Tujuan/Pencapaian  | Ruang lingkup  | RPP  |            |            |     |    |     |    | Jumlah Laporan | Berkas dan Instrumen | Tipe/Status | Ket.       |     |  |           |         |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|------------|------------|-----|----|-----|----|----------------|----------------------|-------------|------------|-----|--|-----------|---------|
|                      |                                   |                   |  |  | RMP  | REK        | RJ         | WKS | WJ | WKS | WJ |                |                      |             |            | WKS | WJ   | WKS       | WJ      |
| <b>DAFTAR KAWASU</b> |                                   |                   |  |  |  |            |            |     |    |     |    |                |                      |             |            |     |  |           |         |
| <b>DAFTAR 1</b>      |                                   |                   |  |  |  |            |            |     |    |     |    |                |                      |             |            |     |  |           |         |
| 1                    | Pengelolaan Manajemen Keseluruhan | Audit Efektifitas | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | 1. BEKAS Bony Arah<br>2. Datasah<br>3. Bepal P/P<br>4. Cetakok                                       | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 6  | 1   | 10 | 19             | 19                   | 65          | 10,275,000 | 7   | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | AUDITOR |
| 2                    | Pengelolaan Manajemen Keseluruhan | Audit Efektifitas | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | 1. BEKAS Bony Arah<br>2. Datasah<br>3. Bepal P/P<br>4. Cetakok                                       | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 6  | 1   | 10 | 19             | 19                   | 65          | 9,810,000  | 6   | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | AUDITOR |
| 3                    | Penerapan Manajemen Risiko        | Evaluasi          | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | 1. BEKAS Bony Arah<br>2. Datasah<br>3. Bepal P/P<br>4. Cetakok                                       | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 7  | 1   | 15 | 19             | 18                   | 85          | 13,025,000 | 13  | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | PPUPO   |
| <b>DAFTAR 2</b>      |                                   |                   |  |  |  |            |            |     |    |     |    |                |                      |             |            |     |  |           |         |
| 4                    | Pengelolaan Manajemen Keseluruhan | Audit Efektifitas | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | Seluruh OPS Wilayah Zona 3   | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 6  | 2   | 19 | 19             | 19                   | 66          | 10,080,000 | 11  | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | AUDITOR |
| 5                    | Pengelolaan Manajemen Keseluruhan | Audit Efektifitas | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | Seluruh OPS Wilayah Zona 4   | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 2   | 6  | 1   | 19 | 19             | 19                   | 66          | 10,080,000 | 11  | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | AUDITOR |
| 6                    | Penerapan Manajemen Risiko        | Evaluasi          | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | Seluruh OPS Wilayah Zona 2   | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 7  | 1   | 19 | 19             | 18                   | 85          | 12,740,000 | 11  | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | PPUPO   |
| <b>DAFTAR 3</b>      |                                   |                   |  |  |  |            |            |     |    |     |    |                |                      |             |            |     |  |           |         |
| 7                    | Pengelolaan Manajemen Keseluruhan | Audit Efektifitas | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | Seluruh OPS Wilayah Zona 3   | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 7  | 2   | 19 | 19             | 19                   | 67          | 14,500,000 | 12  | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | AUDITOR |
| 8                    | Pengelolaan Manajemen Keseluruhan | Audit Efektifitas | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | Seluruh OPS Wilayah Zona 3   | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 2   | 6  | 1   | 19 | 19             | 19                   | 66          | 11,100,000 | 12  | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | AUDITOR |
| 9                    | Penerapan Manajemen Risiko        | Evaluasi          | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | Seluruh OPS Wilayah Zona 3   | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 6  | 1   | 19 | 19             | 19                   | 65          | 14,200,000 | 12  | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | PPUPO   |
| <b>DAFTAR 4</b>      |                                   |                   |  |  |  |            |            |     |    |     |    |                |                      |             |            |     |  |           |         |
| 10                   | Pengelolaan Manajemen Keseluruhan | Audit Efektifitas | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Dinkes<br>3. Dinas PIA<br>4. Kecamatan Purwokerto<br>5. Kecamatan Sukoharjo | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 9  | 1   | 19 | 19             | 19                   | 64          | 9,200,000  | 5   | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | AUDITOR |
| 11                   | Pengelolaan Manajemen Keseluruhan | Audit Efektifitas | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Dinkes<br>3. Dinas PIA<br>4. Kecamatan Purwokerto<br>5. Kecamatan Sukoharjo | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 9  | 1   | 19 | 19             | 19                   | 64          | 9,200,000  | 6   | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | AUDITOR |
| 12                   | LEFO Case-Load di Wilayah Zona 4  | Revisi            | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Dinkes<br>3. Dinas PIA<br>4. Kecamatan Purwokerto<br>5. Kecamatan Sukoharjo | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 8  | 1   | 19 | 19             | 19                   | 63          | 12,400,000 | 4   | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | PPUPO   |
| 13                   | Penerapan Manajemen Risiko        | Revisi            | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Dinkes<br>3. Dinas PIA<br>4. Kecamatan Purwokerto<br>5. Kecamatan Sukoharjo | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 1   | 4  | 1   | 19 | 19             | 19                   | 62          |            | 11  | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | PPUPO   |
| <b>DAFTAR 5</b>      |                                   |                   |  |  |  |            |            |     |    |     |    |                |                      |             |            |     |  |           |         |
| 14                   | Audit dengan Tujuan Tertentu      | Inspektasi/PPUPO  | Membantu, keefektifan tindakan atau Managemen ASN untuk sesuai dengan kebutuhan yang berlaku | Pemerintah Daerah / Pemerintahan Desa  | 5. Keefektifan Pelaksanaan<br>6. Keefektifan Pelaksanaan<br>7. Keefektifan Pelaksanaan | 01 Januari | 31 Januari | 2   | 9  | 2   | 19 | 19             | 19                   | 69          | 12,200,000 | 1   | Laporan, Instrumen, ATK, Keefektifan Operasional | Mandatori | AUDITOR |



| No            | Area Pengembangan   | Jenis Pengembangan | Tajuk/Isi/tema  | Daftar Isitighap   | RPJMD       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Anggaran | Jumlah Laporan | Sarana dan Prasarana | Tingkat Risiko | Ket. |
|---------------|---|--------------------|---|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------------|----------------------|----------------|------|
|               |   |                    |   |  | 2015        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |          |                |                      |                |      |
| 30            | Aspek Strategi Tujuan Tertentu  | Investigasi/PMK    | penyusunan hasil-hasil penelitian, penyusunan kebijakan umum yang berlaku / dilaksanakan oleh lembaga/lembaga/organisasi yang bersangkutan.   | -E   | 01 Februari | 06   | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11       | 12             | AUTOTOP              |                |      |
| 31            | Pelaksanaan LKMD Berbasis Desa, Waku, Keadilan, dan Kesejahteraan, dan Program BLMD dan Penguatan Lembaga | Melaksanakan       | Kemudahan Kapan dan program LKMD Berbasis Desa, Waku, Keadilan, dan Kesejahteraan di 11 Kecamatan Desa, dan 11 Kecamatan BLMD dan Penguatan Lembaga dan Penguatan Waku - Penguatan Waku dan Penguatan Waku. | Presentasi dan Forum   | 01 Februari | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | PPUPO                |                |      |
| 32            | Strategi LKMD Berbasis Desa, Waku, Keadilan, dan Kesejahteraan  | Forum              | penyusunan dokumen LKMD valid dan akurat secara bertahap  | Presentasi dan Forum   | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | PPUPO                |                |      |
| 33            | Penyusunan Rencana Aksi Jangka Panjang Tahun 2025   | Forum dan Rapat    | Memeriksa penyusunan Rencana Aksi Jangka Panjang Tahun 2025 secara bertahap dan akurat  | Presentasi dan Forum   | 01 Februari | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | PPUPO                |                |      |
| <b>BREK 2</b> |   |                    |   |  |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                |                      |                |      |
| 34            | Kemajuan Sektor Strategis Komunitas Ekonomi   | Audit              | Mendali aspek SE + 1 E  | 1. DUKUP<br>2. BUKUP<br>3. BUKU Ajar<br>4. Pelaksanaan di wilayah Kecamatan Namban, Namban, Wauwau, Karpada dan Belegi | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | AUDITOR              |                |      |
| 35            | BLMD  | Audit Berbasis     | Pergerakan, kemajuan dan perkembangan BLMD  | Das yang berisikan di wilayah Kecamatan Wauwau - di desa   | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | AUDITOR              |                |      |
| 36            | BLMD  | Audit Berbasis     | Pergerakan, kemajuan dan perkembangan BLMD  | Das yang berisikan di wilayah Kecamatan Wauwau - di desa   | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | AUDITOR              |                |      |
| 37            | BLMD OFD  | Evaluasi           | Untuk Menilai Akurasi dan Kinerja BLMD dalam meningkatkan pelayanan masyarakat  | 1. Laporan<br>2. Laporan<br>3. Laporan<br>4. Laporan<br>5. Laporan<br>6. Laporan<br>7. Laporan                         | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | PPUPO                |                |      |
| <b>BREK 3</b> |   |                    |   |  |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                |                      |                |      |
| 38            | BLMD OFD  | Evaluasi           | Untuk Menilai Akurasi dan Kinerja BLMD dalam meningkatkan pelayanan masyarakat  | 1. Laporan<br>2. Laporan<br>3. Laporan<br>4. Laporan<br>5. Laporan<br>6. Laporan<br>7. Laporan                         | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | PPUPO                |                |      |
| 39            | BLMD Sektor Strategis Komunitas Ekonomi   | Audit              | Mendali aspek SE + 1 E  | 1. DUKUP<br>2. BUKUP<br>3. BUKU Ajar<br>4. Pelaksanaan di wilayah Kecamatan Namban, Namban, Wauwau, Karpada dan Belegi | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | AUDITOR              |                |      |
| <b>BREK 4</b> |   |                    |   |  |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                |                      |                |      |
| 40            | BLMD OFD  | Evaluasi           | Untuk Menilai Akurasi dan Kinerja BLMD dalam meningkatkan pelayanan masyarakat  | 1. Laporan<br>2. Laporan<br>3. Laporan<br>4. Laporan<br>5. Laporan<br>6. Laporan<br>7. Laporan                         | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | PPUPO                |                |      |
| 41            | BLMD Sektor Strategis Komunitas Ekonomi   | Audit              | Mendali aspek SE + 1 E  | 1. DUKUP<br>2. BUKUP<br>3. BUKU Ajar<br>4. Pelaksanaan di wilayah Kecamatan Namban, Namban, Wauwau, Karpada dan Belegi | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | AUDITOR              |                |      |
| 42            | BLMD OFD  | Evaluasi           | Untuk Menilai Akurasi dan Kinerja BLMD dalam meningkatkan pelayanan masyarakat  | 1. Laporan<br>2. Laporan<br>3. Laporan<br>4. Laporan<br>5. Laporan<br>6. Laporan<br>7. Laporan                         | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | PPUPO                |                |      |
| 43            | BLMD Sektor Strategis Komunitas Ekonomi   | Audit              | Mendali aspek SE + 1 E  | 1. DUKUP<br>2. BUKUP<br>3. BUKU Ajar<br>4. Pelaksanaan di wilayah Kecamatan Namban, Namban, Wauwau, Karpada dan Belegi | 01 Maret    | 01   | 02   | 03   | 04   | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12       | 13             | AUDITOR              |                |      |



















| No            | Area Pengawasan  | Jenis Pengawasan | Tehnik/Pasaran   | Ruang Lingkup | Jadwal      |              | IP |    |    |    |    |     |     | Status dan Pemasangan | Tingkat Risiko | Revisi |    |  |   |    |         |
|---------------|--|------------------|--|---------------|-------------|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------------------|----------------|--------|----|--|---|----|---------|
|               |  |                  |  |               | RAP         | RPL          | PK | PK | PK | PK | PK | PK  | PK  |                       |                |        | PK | PK   |   |    |         |
| 143           | Rencana Kerja Anggaran tahun kerja perangko daerah (Maret 2024)                          | 3                | 1. pengujian kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah dengan kebijakan umum anggaran dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku; 2. pengujian kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah, meliputi: - penyusunan daerah; - penyusunan daerah; dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang mengatur rencana kerja perangko | E             | 1 September | 30 September | 2  | 6  | 1  | 20 | 20 | 20  | 20  | 20                    | 20             | 20     | 10 | Lapops, Pratis, ATN, Kerjasama Operasional | 1 | 12 | AUDITOR |
| 144           | Rencana Kerja Anggaran tahun kerja perangko daerah (Maret 2024)                          | 3                | 1. pengujian kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah dengan kebijakan umum anggaran dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku; 2. pengujian kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah, meliputi: - penyusunan daerah; - penyusunan daerah; dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang mengatur rencana kerja perangko | E             | 1 September | 30 September | 1  | 7  | 1  | 20 | 20 | 20  | 20  | 20                    | 20             | 20     | 10 | Lapops, Pratis, ATN, Kerjasama Operasional | 1 | 12 | AUDITOR |
| <b>TRAS 2</b> |  |                  |  |               |             |              |    |    |    |    |    |     |     |                       |                |        |    |  |   |    |         |
| 145           | Rencana Kerja Anggaran tahun kerja perangko daerah (Maret 2024)                          | 3                | 1. pengujian kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah dengan kebijakan umum anggaran dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku; 2. pengujian kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah, meliputi: - penyusunan daerah; - penyusunan daerah; dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang mengatur rencana kerja perangko | E             | 1 September | 30 September | 1  | 1  | 1  | 50 | 60 | 100 | 100 | 100                   | 100            | 100    | 10 | Lapops, Pratis, ATN, Kerjasama Operasional | 1 | 12 | AUDITOR |
| 146           | Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kajian Proses Pengadaan dan Validasi Pelaksanaan | 3                | 1. menilai kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah dengan kebijakan umum anggaran dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku; 2. menilai kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah, meliputi: - penyusunan daerah; - penyusunan daerah; dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang mengatur rencana kerja perangko     | E             | 1 September | 30 September | 1  | 1  | 1  | 20 | 60 | 100 | 100 | 100                   | 100            | 100    | 10 | Lapops, Pratis, ATN, Kerjasama Operasional | 1 | 12 | AUDITOR |
| 147           | Pengelolaan BUKU   | 3                | 1. menilai kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah dengan kebijakan umum anggaran dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku; 2. menilai kelayakan/ kesesuaian rencana kerja anggaran tahun kerja perangko daerah, meliputi: - penyusunan daerah; - penyusunan daerah; dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang mengatur rencana kerja perangko     | E             | 1 September | 30 September | 1  | 1  | 1  | 20 | 20 | 100 | 100 | 100                   | 100            | 100    | 10 | Lapops, Pratis, ATN, Kerjasama Operasional | 1 | 12 | AUDITOR |
| <b>TRAS 3</b> |  |                  |  |               |             |              |    |    |    |    |    |     |     |                       |                |        |    |  |   |    |         |









| No                        | Area Pengawasan  | Jenis Pengawasan      | Tajuk/Sasaran  | Ruang Lingkup   | Jumlah                    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |  | Status dan Prognosis | Vilagkat Status    | Kec. |
|---------------------------|--|-----------------------|--|---|---------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|--|----------------------|--------------------|------|
|                           |  |                       |  |   | WPK                       | PK | PK | PT | PT | AT | AT | AT  | AT  | AT | AT | AT   |                      |                    |      |
| 196                       | Lapasan Penyelenggaraan Manajemen Risiko proses pengujian dan validasi produk plasma | Analisis              | 1. Digides<br>2. Diinformasikan<br>3. Diinformasikan<br>4. Diinformasikan<br>5. Diinformasikan   | 6. BIKAS<br>7. BIKAS KESAMAJUAN BANGSA DAN POLISEK<br>8. KEMAMPUAN KINERJAKORPRI<br>9. KEMAMPUAN BELAJAR<br>10. KEMAMPUAN LAYANAN<br>11. KEMAMPUAN BERKARYA | 1 Desember<br>20 Desember | 1  | 10 | 1  | 20 | 20 | 40 | 90  | 90  | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | PPUD               |      |
| 197                       | Alamatselaku Belanja   | Audit ketepatan       | Monev/iklan layanan secara manual dan melalui APB 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku  | DINAS SISWA, PEMBERDAYAAN, TEKNOLOGI DAN PERUBAHAN  | 1 Desember                | 1  | 5  | 1  | 20 | 20 | 20 | 67  | 67  | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | Belanja            |      |
| 198                       | Alamatselaku Belanja   | Audit ketepatan       | Monev/iklan layanan secara manual dan melalui APB 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku  | DINAS YERIBUKAH DAN PETERMAMON  | 1 Desember                | 1  | 5  | 1  | 20 | 20 | 20 | 67  | 67  | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | Belanja            |      |
| 199                       | Belanja Belanja untuk WPK, CWA   | Survei                | Desig di Wilayah Irian +   |   | 1 Desember                | 1  | 5  | 1  | 20 | 20 | 20 | 67  | 67  | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | PPUD               |      |
| <b>REKAM KEBERHASILAN</b> |  |                       |  |   |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |  |                      |                    |      |
| 200                       | Audit dengan Tajuk Tersebut  | Investigatif/PRISM    | memahami pelaksanaan terkait kegiatan penyediaan layanan plasma yang berbasis / Monev/iklan nilai layanan yang berbasis (sistem yang dilaksanakan dari mana) secara manual | Pemerintahan Daerah / Pemerintahan Tani   | 1 Desember                | 2  | 10 | 2  | 20 | 20 | 40 | 94  | 94  | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | REKAM KEBERHASILAN |      |
| 201                       | Penyusunan Anggaran dan Pengadaan barang dan Jasa Tahunan IV                         | Survei                | Memastikan layanan nilai Anggaran APB 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku  | BIKAS & URPSA   | 1 Desember                | 2  | 10 | 2  | 20 | 20 | 40 | 94  | 94  | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | REKAM KEBERHASILAN |      |
| 202                       | Belanja Penyelenggaraan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Belanja Tahun 2015          | Survei                | Memastikan Penyelenggaraan Risiko Penyelenggaraan Belanja 2015 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku  | Pemerintahan Daerah   | 1 Desember                | 2  | 10 | 2  | 20 | 20 | 40 | 114 | 114 | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | PPUD               |      |
| <b>REKAM KEBERHASILAN</b> |  |                       |  |   |                           |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |  |                      |                    |      |
| 203                       | SESB   | Survei                | Memastikan layanan, kepatuhan, dan penyelesaian nilai pengujian selanjutnya Memastikan kepatuhan, kepatuhan, dan penyelesaian nilai pengujian selanjutnya                  | Dalam rangka Tim gabungan Irian 1 s.d. II   | 1 Mei                     | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 140 | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | Audit & PPUD       |      |
| 204                       | SESB   | Survei                | Memastikan layanan, kepatuhan, dan penyelesaian nilai pengujian selanjutnya Memastikan kepatuhan, kepatuhan, dan penyelesaian nilai pengujian selanjutnya                  | Dalam rangka Tim gabungan Irian 1 s.d. III  | 30 Juni                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 140 | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | Audit & PPUD       |      |
| 205                       | PS APB   | Pengawasan Kapadriana | Memastikan kepatuhan APB telah terpenuhi secara standar  | Dalam rangka Tim gabungan Irian 1 s.d. III  | 30 Juni                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | 140 | 1  | 10 | Lapang, Prater, ATK, Kelembagaan Operasional | Mandiri              | Audit & PPUD       |      |

| No  | Area Program                    | Garis Program            | Tugas/Isi   | Ruang Lingkup                         | BMP       |             | Jadwal |     | RP |    |    |    |    |    |    | Jumlah Laporan | Anggaran | Berkas dan Instrumen | Tingkat Risiko | Ref. |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-------------|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----------|----------------------|----------------|------|
|     |                                 |                          |   |                                       | 1 Juli    | 31 Juli     | BPK    | BPK | PK | PK | PK | PK | PK | PK | PK |                |          |                      |                |      |
| 206 | Triada Segitah                  | 3                        | Meningkatkan dan profesionalitas dan APSP (dalam meningkatkan tugas pelayanan)          | Tim pengembang (TPT) s.d. (khusus)    | 1 Juli    | 31 Juli     | 20     | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20             | 20       | 20                   | 20             | 20   |
| 207 | Programasi BPTP Berbasis Risiko |                          | Membantu BPTP 2008 berfokus risiko secara sistematis                                    | Tim pengembang (TPT) s.d. (khusus)    | 1 Oktober | 31 Oktober  |        |     |    |    |    |    |    |    |    |                |          |                      |                |      |
| 208 | Coaching                        | Jam konsultasi/pelatihan | Memberikan jasa konsultasi pada APSP terkait penyelenggaraan sistem pemerintahan Daerah | OPD di seluruh (khusus) s.d. (khusus) | 2 Januari | 31 Desember |        |     |    |    |    |    |    |    |    |                |          |                      |                |      |
| 209 | Programasiin Gatifikasi         | Monitoring               | Terpenuhinya pelaksanaan gatifikasi   | Pemerintah Daerah                     | 2 Januari | 31 Desember |        |     |    |    |    |    |    |    |    |                |          |                      |                |      |

